

## Pemberdayaan Masyarakat Digital : Peluang, Tantangan Serta Metode

Genik Puji Yuhanda<sup>1</sup>, Muhibudin Wijaya Laksana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hubungan Masyarakat, Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)  
Bandung, Indonesia, genikpujiyuhada@plb.ac.id

<sup>2</sup>Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, muhibudinwijayalaksana@uinsgd.ac.id

### Abstract

Digital community empowerment has become an increasingly important topic in the current era of digitalization. In this scientific article, we conduct a literature review to explain the concept, challenges and benefits of digital community empowerment. We analyzed various related articles, books and reports published in recent years to present a comprehensive picture of how digital societal empowerment can be realized and measured. We also discuss the role of information and communications technology (ICT) in increasing community empowerment, as well as the social, economic and political implications of this phenomenon.

**Keywords:** *Community Empowerment, Digital Empowerment, Digital Society, Digitalization*

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat digital telah menjadi topik yang semakin penting dalam era digitalisasi saat ini. Dalam artikel ilmiah ini, kami melakukan tinjauan literatur untuk menjelaskan konsep, tantangan, dan manfaat pemberdayaan masyarakat digital. Kami menganalisis berbagai artikel, buku, dan laporan terkait yang diterbitkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat digital dapat direalisasikan dan diukur. Kami juga membahas peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari fenomena ini.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Digital, Masyarakat Digital, Digitalisasi*

### Pendahuluan

Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, pemberdayaan masyarakat digital telah muncul sebagai topik yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian akademisi yang mengkaji dampak-dampaknya secara mendalam, tetapi juga menarik minat praktisi yang berupaya menerapkan konsep-konsep tersebut dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, para pembuat kebijakan juga semakin memperhatikan pentingnya pemberdayaan masyarakat digital dalam merancang kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap perubahan yang dibawa oleh revolusi digital. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional, isu pemberdayaan masyarakat digital telah menjadi topik yang sering dibahas dalam forum-forum global, karena dampaknya yang luas dan signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Dengan munculnya teknologi baru dan transformasi digital yang terus berlangsung, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam diskusi dan implementasi strategi

pemberdayaan masyarakat digital guna memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat digital merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) demi mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital (Loader et al., 2000; Mayasari et al., 2022; Susanti et al., 2023). Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga melibatkan penguatan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkannya secara efektif. Misalnya, melalui pelatihan dan edukasi tentang penggunaan TIK, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat digital juga mencakup aspek partisipasi dan keterlibatan dalam pembentukan dan penggunaan teknologi (Coy et al., 2021; Putri & Pratiwi, 2022). Hal ini berarti bukan hanya tentang menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi kontributor aktif dalam menciptakan solusi dan inovasi baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam masyarakat. Dengan mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam pengembangan teknologi, kita dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Fillan et al., 2023). Dengan demikian, konsep pemberdayaan masyarakat digital melampaui sekadar memberikan akses teknologi, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas dan partisipasi aktif dalam pembentukan masa depan yang semakin terhubung secara digital.

## **Metode**

Dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pemberdayaan masyarakat digital, artikel ini mendasarkan diri pada tinjauan literatur yang komprehensif. Dengan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk artikel, buku, dan laporan terkait yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir, kami bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang aspek-aspek kunci yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam era digitalisasi.

Tinjauan literatur ini mencakup berbagai dimensi, seperti akses teknologi, partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta manfaat dan tantangan yang terkait. Dengan demikian, artikel ini menjadi landasan penting bagi pembaca untuk memahami secara lebih dalam bagaimana pemberdayaan masyarakat digital dapat diwujudkan, dinilai, dan diimplementasikan dalam berbagai konteks masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Konsep Pemberdayaan Masyarakat Digital***

Pemberdayaan masyarakat digital merupakan suatu pendekatan yang mengakui peran penting teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat (Bailur & Gigler, 2014; Gigler, 2004; Mahmudah, 2020). Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, pemberdayaan masyarakat digital menjadi semakin relevan karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat digital tidak hanya mengacu pada penyediaan akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga melibatkan penguatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memanfaatkannya secara efektif seperti

literasi digital, kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemahaman tentang etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi (Bawden, 2008; Syafrial, 2023; Tinmaz et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat digital juga mencakup aspek partisipasi dan keterlibatan dalam ekosistem digital (Bachtiar et al., 2020; Laksana & Abduh, 2023; Lilleker & Koc-Michalska, 2018). Hal ini berarti masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga menjadi kontributor aktif dalam menciptakan konten, solusi, dan inovasi baru. Partisipasi aktif ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar atas pengembangan teknologi dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, partisipasi dalam ekosistem digital juga dapat membuka peluang baru dalam hal ekonomi kreatif dan kolaboratif, di mana masyarakat dapat menghasilkan pendapatan melalui berbagai platform dan layanan daring.

Salah satu aspek penting dari pemberdayaan masyarakat digital adalah mengatasi kesenjangan digital yang ada di masyarakat (Mustafa et al., 2023; Vartanova & Gladkova, 2019; Yu, 2002). Kesempatan untuk mengakses teknologi dan memanfaatkannya secara efektif tidak selalu merata di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan digital, seperti akses terhadap infrastruktur teknologi, keterampilan dan literasi digital, serta masalah ekonomi dan sosial. Dengan mengatasi kesenjangan ini, pemberdayaan masyarakat digital dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara dalam mengambil manfaat dari era digitalisasi.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat digital juga melibatkan pembentukan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi, pendidikan digital, dan inklusi digital (Bangsawan, 2023; Haniko et al., 2023; Setyasih, 2022; Wiley & Goulding, 2023). Pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat digital, baik melalui investasi dalam akses teknologi maupun regulasi yang mempromosikan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi. Dengan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat digital dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam era digital yang terus berkembang.

### ***Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Politik***

Pemberdayaan masyarakat digital membawa implikasi yang luas dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosial, pemberdayaan masyarakat digital memiliki potensi besar untuk memperkuat inklusi sosial dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat (Achmad, 2022; Loader et al., 2000). Melalui akses yang lebih luas terhadap informasi dan jaringan sosial yang lebih terbuka, individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau diabaikan dapat merasa lebih terhubung dengan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Selain itu, pemberdayaan masyarakat digital juga dapat memfasilitasi partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik (Loader et al., 2000; Sharma et al., 2022), seperti kampanye advokasi atau aksi kolektif untuk perubahan sosial.

Secara ekonomi, pemberdayaan masyarakat digital membuka pintu bagi peluang baru dalam ekonomi digital (Alfiana et al., 2023; Boateng et al., 2023). Dengan meningkatnya konektivitas dan penetrasi internet, individu dan perusahaan memiliki akses yang lebih besar ke pasar global dan pelanggan potensial. Hal ini menciptakan peluang untuk inovasi bisnis dan pengembangan produk dan layanan baru yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemberdayaan masyarakat digital juga dapat meningkatkan

produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara melalui peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Dahlman et al., 2016; Hosana et al., 2023).

Secara politik, pemberdayaan masyarakat digital memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi dalam proses demokratis (Elizamiharti & Nelfira, 2024; Sharma et al., 2022; Suherlan, 2023). Dengan adanya platform dan alat digital, warga dapat lebih mudah mengakses informasi politik, berdiskusi tentang isu-isu publik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat memperkuat akuntabilitas publik dan memungkinkan warga untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan (Lutpi et al., 2022). Selain itu, pemberdayaan masyarakat digital juga dapat membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak terwakili dapat memiliki suara dalam proses politik.

### ***Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Digital***

Pemberdayaan masyarakat digital menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya akses dan keterampilan digital bagi masyarakat. Dengan meningkatkan akses terhadap teknologi dan memberikan pelatihan yang sesuai, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan dan peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Misalnya, pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah diakses oleh individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses kurikulum yang berkualitas dan meningkatkan keterampilan mereka tanpa harus berpindah tempat. Selain itu, layanan kesehatan digital juga memungkinkan masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan mereka sendiri, berkonsultasi dengan profesional medis, dan mengakses informasi kesehatan secara lebih cepat dan efisien.

Selain manfaat individual, pemberdayaan masyarakat digital juga dapat memberikan dampak positif secara kolektif bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, partisipasi dalam proses demokratis dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau memberikan masukan kepada pemerintah melalui platform partisipatif. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat digital juga memiliki potensi untuk memperkuat inklusi sosial dengan memperluas akses terhadap informasi dan sumber daya bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau tidak terwakili. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari era digital ini.

### ***Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Digital***

Meskipun potensi pemberdayaan masyarakat digital sangat besar, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mencapai visi tersebut secara menyeluruh. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan akses terhadap infrastruktur dan keterampilan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta di antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda (Vartanova & Gladkova, 2019; Yu, 2002).

Di banyak negara, wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur telekomunikasi dan internet yang cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Ini menciptakan kesenjangan digital antara penduduk perkotaan dan pedesaan, di mana mereka yang tinggal di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan digital yang sama dengan mereka yang tinggal di kota besar. Selain itu, ada juga kesenjangan dalam

keterampilan digital di antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda. Kelompok-kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan sering kali memiliki akses dan keterampilan digital yang lebih terbatas, sehingga mereka rentan tertinggal dalam era digitalisasi ini.

Selain kesenjangan akses, masalah privasi dan keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat digital (Farayola et al., 2024; Hiranandani, 2011). Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan dipertukarkan melalui internet, kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data menjadi semakin meningkat. Pelanggaran data dan kebocoran informasi pribadi telah menjadi masalah serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi privasi dan keamanan data masyarakat. Hal ini termasuk kebijakan yang memperkuat perlindungan data pribadi, pengembangan infrastruktur keamanan digital yang kuat, serta edukasi masyarakat tentang praktik-praktik yang aman dalam penggunaan teknologi digital.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, langkah-langkah kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital secara adil dan aman. Salah satu langkah kebijakan yang bisa diambil adalah meningkatkan akses infrastruktur digital di daerah pedesaan melalui investasi dalam pembangunan jaringan internet dan teknologi telekomunikasi lainnya. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan digital juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan kelompok yang kurang mampu. Di samping itu, penting untuk memperkuat regulasi dan standar keamanan data untuk melindungi privasi individu dan keamanan informasi. Dengan demikian, dengan kombinasi langkah-langkah kebijakan yang komprehensif, diharapkan bahwa tantangan-tantangan dalam pemberdayaan masyarakat digital dapat diatasi secara efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

### **Metode Pemberdayaan Masyarakat Digital**

Metode pemberdayaan masyarakat digital mencakup beragam pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses, keterampilan, partisipasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif dalam masyarakat. Beberapa metode umum yang sering digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat digital. *Pertama*, pendidikan dan pelatihan digital yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di antara anggota masyarakat. Metode ini meliputi pelatihan dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, navigasi internet, keamanan online, serta pemahaman tentang aplikasi teknologi untuk kebutuhan sehari-hari seperti pendidikan dan pekerjaan. *Kedua*, akses terhadap infrastruktur teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan akses fisik terhadap jaringan internet dan perangkat komputer. Metode ini dapat dilakukan melalui investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang masih kurang terjangkau atau terpencil.

*Ketiga*, pengembangan konten lokal, yakni dengan membangun konten digital yang relevan dan bermanfaat dalam bahasa dan konteks lokal dapat meningkatkan adopsi dan pemanfaatan teknologi di tingkat masyarakat. Metode ini bisa melibatkan pembuatan aplikasi, platform pembelajaran daring, atau situs web yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi lokal. *Keempat*, partisipasi masyarakat, dimana pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan teknologi dan pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan teknologi dalam komunitas mereka. Metode meliputi pendekatan partisipatif dalam pengembangan solusi teknologi, forum diskusi atau kelompok fokus untuk memahami kebutuhan masyarakat, dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan teknologi. *Kelima*, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil yang dapat mencakup

investasi bersama dalam infrastruktur teknologi, program pelatihan dan pendidikan digital, serta inisiatif untuk meningkatkan literasi dan keamanan digital.

*Keenam*, upaya advokasi untuk mengubah atau mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat digital yang meliputi advokasi untuk akses terbuka dan netralitas internet, perlindungan privasi dan keamanan data, serta regulasi yang mendukung inklusi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan teknologi. Ketujuh, program-program pendidikan dan penyuluhan yang diselenggarakan di tingkat komunitas dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko teknologi digital. Metode ini dapat melibatkan pelatihan dalam penggunaan alat-alat digital untuk kegiatan sehari-hari, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya keamanan dan privasi dalam menggunakan teknologi.

### **Kesimpulan**

Pemberdayaan masyarakat digital menghadirkan beragam manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatkan akses dan keterampilan digital, masyarakat dapat mengambil manfaat dari layanan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Ini termasuk akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta peningkatan partisipasi dalam proses demokratis. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan akses dan keterampilan digital antara wilayah dan kelompok sosial yang berbeda, serta masalah privasi dan keamanan data yang semakin kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah kebijakan yang tepat diperlukan, termasuk investasi dalam infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, dan penguatan regulasi untuk melindungi privasi dan keamanan data.

Pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemberdayaan masyarakat digital tidak dapat diabaikan. TIK tidak hanya menyediakan infrastruktur untuk komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang pemberdayaan. Melalui penggunaan TIK dengan bijak, masyarakat dapat mengatasi batasan geografis dan ekonomi dalam mengakses layanan dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, penggunaan TIK juga membawa risiko dan tantangan, seperti masalah privasi dan keamanan data serta kesenjangan dalam akses dan keterampilan digital. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan yang bijak dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengambil manfaat dari pemberdayaan masyarakat digital tanpa mengorbankan keamanan dan privasi mereka. Dengan demikian, literasi digital dan pemahaman tentang etika dalam penggunaan TIK menjadi kunci dalam upaya untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Referensi**

- Achmad, W. (2022). Social action and social solidarity: community empowerment in the digital age. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 1(3), 179–184.
- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113–7120.
- Bachtiar, R., Pramesti, D. L. D., Pratiwi, H. E., & Saniyyah, N. (2020). Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 104–129.
- Bailur, S., & Gigler, B.-S. (2014). Introduction: the potential for empowerment through ICTs. *Closing the Feedback Loop*, 1.

- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40.
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*, 30(2008), 17–32.
- Boateng, S. L., Boateng, R., & Anning-Dorson, T. (2023). *Empowering Women in the Digital Economy: A Quest for Meaningful Connectivity and Access in Developing Countries*. CRC Press.
- Coy, D., Malekpour, S., Saeri, A. K., & Dargaville, R. (2021). Rethinking community empowerment in the energy transformation: A critical review of the definitions, drivers and outcomes. *Energy Research & Social Science*, 72, 101871.
- Dahlman, C., Mealy, S., & Wermelinger, M. (2016). *Harnessing the digital economy for developing countries*.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2024). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72.
- Farayola, O. A., Olorunfemi, O. L., & Shoetan, P. O. (2024). Data privacy and security in IT: a review of techniques and challenges. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(3), 606–615.
- Fillan, N. A. Z. S., Naziha, R. Z. N., & Jauhari, R. (2023). Partisipasi Karang Taruna Dalam Kegiatan Pemerintahan di Desa Jatimukti. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 11–19.
- Gigler, B.-S. (2004). Including the Excluded-Can ICTs empower poor communities? Towards an alternative evaluation framework based on the capability approach. *Towards an Alternative Evaluation Framework Based on the Capability Approach (August 1, 2004)*. Gigler, Björn-Sören. "Including the Excluded-Can ICTs Empower Poor Communities.
- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(05), 306–315.
- Hiranandani, V. (2011). Privacy and security in the digital age: contemporary challenges and future directions. *The International Journal of Human Rights*, 15(7), 1091–1106.
- Hosana, M. J., WN, N. U., & Simanjuntak, T. R. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Peningkatan Ekonomi Digital Tahun 2020-2022. *Administraus*, 7(1), 75–96.
- Laksana, M. W., & Abduh, M. (2023). The Power of Social Movements: Activism in the Age of Connectivity. *Journal of Current Social and Political Issues*, 1(1), 18–23.
- Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2018). What drives political participation? Motivations and mobilization in a digital age. In *Digital Politics: Mobilization, Engagement and Participation* (pp. 21–43). Routledge.
- Loader, B. D., Hague, B., & Eagle, D. (2000). Embedding the net: community empowerment in the age of information. In *Community informatics: Enabling communities with information and communications technologies* (pp. 81–102). IGI Global.
- Lutpi, S. A., Rohimat, M. F., Alpin, A., & Laksana, M. W. (2022). Netizen's Reception of Covid-19 Vaccination Policy Communication Through Instagram Account@ kemenkes\_ri. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 65–77.
- Mahmudah, D. (2020). Upaya pemberdayaan tik dan perlindungan generasi z di era digital. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(01).
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. Penerbit Nem.
- Mustafa, M., Rohayati, R., Abdullah, A., Alhidayatillah, N., & Astuti, D. P. (2023). From Inequality to Digital Inclusion: Opportunities and Challenges of Digitalization among Santri in Indonesia:

- Dari Kesenjangan ke Inklusi Digital: Peluang dan Tantangan Digitalisasi di Kalangan Santri di Indonesia. *SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 319–325.
- Putri, I. R., & Pratiwi, E. (2022). Aktivisme digital dan pemanfaatan media baru sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat atas isu lingkungan. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(2), 231–246.
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat. *PAPATUNG J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. Dan Polit*, 5(3), 59–66.
- Sharma, S., Kar, A. K., Gupta, M. P., Dwivedi, Y. K., & Janssen, M. (2022). Digital citizen empowerment: A systematic literature review of theories and development models. *Information Technology for Development*, 28(4), 660–687.
- Suherlan, S. (2023). Digital Technology Transformation in Enhancing Public Participation in Democratic Processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), 10–17.
- Susanti, P. A., Hadjaat, M., Wasil, M., & Susilawati, A. D. (2023). Meningkatkan Literasi Teknologi di Masyarakat Pedesaan Melalui Pelatihan Digital. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 12–21.
- Syafrial, H. (2023). *Literasi Digital*. Nas Media Pustaka.
- Tinmaz, H., Lee, Y.-T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 21.
- Vartanova, E., & Gladkova, A. (2019). *New forms of the digital divide*.
- Wiley, K., & Goulding, A. (2023). The conceptualization of digital inclusion in government policy: A qualitative content analysis. *International Conference on Information*, 527–543.
- Yu, P. K. (2002). Bridging the digital divide: Equality in the information age. *Cardozo Arts & Ent. LJ*, 20, 1.